



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO  
**UNIT KERJA** : DINAS KETAHANAN PANGAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : HARTAWAN
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 721605

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.600.000.000**

1. Tanah Seluas 12000 m2 di KAB / KOTA JENEPONTO, WARISAN  
Rp. 550.000.000
2. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA JENEPONTO, HASIL  
SENDIRI Rp. 50.000.000
3. Tanah Seluas 2000 m2 di KAB / KOTA JENEPONTO, HASIL  
SENDIRI Rp. 50.000.000
4. Tanah Seluas 72 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR ,  
WARISAN Rp. 75.000.000
5. Tanah Seluas 72 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL  
SENDIRI Rp. 75.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/580 m2 di KAB / KOTA KOTA  
PAREPARE , WARISAN Rp. 800.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 149.000.000**

1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.  
6.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.  
18.000.000
3. MOTOR, YAMAHA N.MAX Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.  
25.000.000
4. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp.  
100.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp. ----**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	60.664.425
F. HARTA LAINNYA	Rp.	350.000.000
Sub Total	Rp.	2.159.664.425
III. HUTANG	Rp.	198.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.961.664.425

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.